



Dr. M. Uhaib As'ad, M.Si.

POLITIK BISNIS TAMBANG

DALAM

PERSEKONGKOLAN PILKADA
DI KALIMANTAN SELATAN

**POLITIK
BISNIS TAMBANG**

DALAM

**PERSENGKONGKOLAN PILKADA
DI KALIMANTAN SELATAN**

POLITIK BISNIS TAMBANG DALAM PERSEKONGKOLAN PILKADA DI KALIMANTAN SELATAN

© M. Uhaib As'ad

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, 2016

Editor : Catur Yuniyanto, SH., MH.
Penata Letak : Joko P.
Perancang Sampul : Dwi Pengkik
Pracetak : Arlisa St. Zahra
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana



Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. 081332732896
WA: 081234526582
PIN: 5BDAAE37
Email: redaksigenta@yahoo.com

M. Uhaib As'ad

POLITIK BISNIS TAMBANG DALAM PERSEKONGKOLAN PILKADA DI KALIMANTAN SELATAN

Yogyakarta: GENTA Press 2016
viii + 272 hlm. : 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-978-3988-80-1

PENGANTAR PENULIS

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyajikan tulisan yang semula merupakan disertasi yang berjudul: Jaringan Bisnis Politik Dalam Kebijakan Pertambangan Batubara Di Era Desentralisasi (Studi di Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel). Karena untuk kepentingan penerbitan maka disertasi ini mengalami beberapa perubahan termasuk judulnya.

Disertasi ini merupakan kepedulian penulis terhadap pengelolaan pertambangan batubara yang carut marut yang banyak mengalami permasalahan dalam mencapai pola pengelolaan yang efektif. Karena itu tulisan ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi kebijakan pengelolaan pertambangan batubara dalam mengatasi permasalahan.

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Politik dalam Kebijakan Pertambangan, (2), Aktor dan Jaringan Bisnis dalam Politik Kebijakan Pertambangan Batubara, (3), Regulasi pengelolaan kebijakan pertambangan dan dampaknya Terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, (4) model ideal *good coal mining practices* dalam kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Pokok-pokok bahasannya meliputi Bab I Jaringan Bisnis dan Politik Dalam Kekuasaan, Bab II Kajian Teoritik dan Penelitian Bisnis Pertambangan, Bab III Fakta dan Data Bisnis Pertambangan di Daerah, Bab IV Pertambangan Batubara di Tanah Bumbu, Bab V Konspirasi Politik Dalam Pertambangan Batubara, Bab VI Pilkada Sebagai Strategi Membangun Patronase Jaringan Politik dan Bisnis Pertambangan dan Bab VII Implikasi Teori dan Empirik Kebijakan Pertambangan Di Tanah Bumbu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih ada kekurangannya, karena itu saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak diterima dengan senang hati untuk penyempurnaan tulisan ini.

Malang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I JARINGAN BISNIS DAN POLITIK DALAM KEKUASAAN	1
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PENELITIAN BISNIS PERTAMBANGAN	21
BAB III FAKTA DAN DATA BISNIS PERTAMBANGAN DI DAERAH	87
BAB IV PERTAMBANGAN BATUBARA DI TANAH BUMBU	95
BAB V KONSPIRASI POLITIK DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA	113
BAB VI PILKADA SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN PATRONASE JARINGAN POLITIK DAN BISNIS PERTAMBANGAN	181
BAB VII IMPLIKASI TEORI DAN EMPIRIK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI TANAH BUMBU	243
DAFTAR PUSTAKA	247
GLOSSARY	261
TENTANG PENULIS	263

BAB I

JARINGAN BISNIS DAN POLITIK DALAM KEKUASAAN

Studi mengenai jaringan bisnis politik dalam sejarah panggung kekuasaan Orde Baru memperlihatkan suatu realitas persekongkolan antara aktor negara (*state*) dan aktor pasar (*market*). Hal ini terbangun dengan cara memanfaatkan institusi kekuasaan, regulasi, dan pola hubungan patronase untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi dan politik. Di tengah struktur kekuasaan otoriter Orde Baru, struktur perekonomian negara dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan pola patronase dalam lingkaran elite-elite Orde Baru (Muhaimin, 1991, MacIntyre, 1992).

Kekuatan oligarki dan pola patronase yang terstruktur tersebut karena adanya hubungan kedekatan (*personal contact*) dengan elite-elite Orde Baru dan relasi kuasa dalam jaringan birokrasi pemerintahan. Hal demikian ini telah mendorong lahirnya pengusaha klien (*business-client*) yang memonopoli sumber-sumber ekonomi melalui kebijakan, proteksi, dan lisensi yang diberikan oleh negara. Menurut Winters (2006, 2011), kelompok oligarki dan pengusaha klien ini muncul dari kalangan birokrat sipil dan militer yang mendapatkan fasilitas kebijakan yang melahirkan kekuatan jaringan bisnis politik (*the rise of political business networking*).

Jaringan bisnis politik yang berkembang selama kekuasaan Orde Baru bila merujuk pada Muhaimin (1991), adalah kelompok bisnis yang mendapatkan proteksi kebijakan dan lisensi di tengah dominannya peran negara dalam mengendalikan kebijakan perekonomian. Dominasi peran negara terhadap struktur ekonomi dan politik yang dikuasai oleh kekuatan birokrasi pemerintahan oleh Jackson (1978) digambarkan sebagai *bureaucratic polity*, dimana kekuatan kelompok birokrat menguasai sumber daya ekonomi secara monopolistik.

Argumentasi konsepsi teoritik *bureaucratic polity* Jackson tersebut menggambarkan bahwa kelompok birokrat memainkan peran dalam mendesain kebijakan-kebijakan ekonomi dan kekuasaan politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sumber daya ekonomi negara (*economy resources*) berada dalam monopoli segelintir orang atau para aktor yang memiliki hubungan patronase ekonomi dan politik dalam jaringan birokrasi pemerintah. Menurut Jackson dan Pye (1978) bahwa penguasa Orde Baru telah memeralat institusi kekuasaan sebagai sumber legitimasi (*legitimacy*) untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik. Dalam perkembangannya, struktur kekuasaan ekonomi dan politik telah merefleksikan model korporatisme negara (*state*

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PENELITIAN BISNIS PERTAMBANGAN

Studi ini menggunakan pendekatan perspektif ekonomi politik untuk mendeskripsikan jaringan bisnis dalam politik kebijakan pertambangan dalam dialektika kepentingan antara negara (*state*) dan pasar (*market*). Sebagai *grand theory* (teori utama) yang digunakan dalam menjelaskan *puzzle study* ini adalah teori Marx (1961) tentang Dialektika Materialisme yang melihat dominannya peran negara atas sumberdaya dan melemahnya posisi rakyat. Dalam hal ini negara tampil sebagai instrumen yang memfasilitasi kepentingan pasar sehingga dan pasar pun mendominasi negara. Teori ini sebagai kajian dan varian dari Neo Marxist dan Teori Struktural yang pada intinya menjelaskan bahwa golongan elite sebagai kelas yang dominan terpusat pada sedikit orang menguasai masyarakat sebagai kelas yang didominasi.

Teori utama lainnya yang merupakan grand teori dalam penulisan disertasi ini yaitu kebijakan publik dalam pandangan Caporaso (1996:197) bahwa keadilan *decision makers* dalam menentukan pilihan-pilihan kebijakan adalah dinamika kompleks yang melibatkan kepentingan kesejahteraan *society*, kepentingan privat dan sejauhmana keadilan itu berorientasi pada kesejahteraan umum. Teori relasi antar pasar dan pemerintah seperti yang disentil Indriahono (2006:14-15) menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan publik yang merupakan arena pertarungan. Market secara ideal bergerak dibidang privat yang mendapatkan jaminan tidak akan diganggu gugat oleh pemerintah selama usaha yang dilakukannya tidak merugikan kepentingan umum. Begitupun government sebagai penguasa, pembuat kebijakan yang akan berkonsekwensi luas, secara ideal tidak bisa diinterveisi siapapun termasuk market. *Government* adalah ujung tombak *distribution of welfare* dan amat bernilai tinggi, jika penguasa bermain dengan sebuah *group interest*, karena akan menyebabkan ketimpangan pembagian kesejahteraan bagi rakyat.

Selain menggunakan analisis Dialektika Materialisme Marx tersebut, dan kebijakan publik, juga terdapat teori dualitas struktur Anthony Giddens menjelaskan studi ini, yaitu suatu persekongkolan bisnis-politik antara para aktor dalam pengelolaan sumber daya alam karena adanya kepentingan tersembunyi para aktor. Adapun tesis dari teori dualitas struktur Giddens (1984), yaitu memfokuskan mencari hubungan titik temu antara struktur dengan aktor yang menyatakan bahwa struktur dan aktor atau agen saling berhubungan sehingga disebut sebagai dualitas struktur. Dalam hal ini terkait adanya penggunaan institusi kekuasaan, lembaga demokrasi seperti lembaga legislatif, partai politik,

BAB III

FAKTA DAN DATA BISNIS PERTAMBANGAN DI DAERAH

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan empirik. Penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk ditarik hubungan sebab akibat dari penelitian ini.

Realitas yang diamati bervariasi dan banyak fakta yang tidak mungkin diungkapkan melalui observasi seperti latar belakang perilaku objek, bagaimana menjalankan kebijakan, dan bagaimana interaksi elite politik dengan instansi birokrasi pemerintah, komparador lokal (pengusaha tambang), politisi atau elite partai politik, serta dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dengan objek untuk memperoleh penafsiran empirik, yaitu deskripsi yang didasarkan pada persepsi informan terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini tidak untuk digeneralisasi, namun untuk menguraikan fakta dan realitas secara rinci (*thick description*) dan tidak bertujuan menguji atau menguatkan teori tertentu, namun secara induktif akan mengeksplorasi data empirik untuk menarik kesimpulan, sehingga penelitian ini memenuhi syarat sebagai penelitian kualitatif (Merriam, 1998:18).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan sosiologi *fenomenologi* yang dikembangkan oleh filsuf Edmund Husserl dan Alfred Schultz, sebagai metode yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Menurut Weber disebut sebagai *verstehen*, sebagai pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti (Moleong, 2000). Pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dilakukan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti.

Pendekatan fenomenologi seperti yang dikembangkan oleh Maurice Natanson dalam bukunya *Philosophy of social science: A Reader* (Mulyana, 2002: 59) mengemukakan bahwa pendekatan fenomenologi yang menjelaskan bahwa untuk memahami perilaku seseorang tidak bisa hanya dilihat dari perilaku yang tampak, namun harus memperhatikan motif dan nilai yang

BAB IV

PERTAMBANGAN BATUBARA DI TANAH BUMBU

4.1. Sejarah terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu

Sejarah terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu ditelusuri melalui tulisan Dr. Eisen Berger (1750) yang menulis bahwa Pagatan dibangun oleh orang-orang Bugis. Tetapi sebelum itu lebih dahulu sudah ada banyak orang Bugis di sekitar muara Sungai Kusan dan Kawasan Tanah Bumbu, kemudian disusul oleh suku bangsa lainnya yang datang yakni terdiri dari Banjar, Jawa, Buton, Madura, Bali, Batak, Lombok, kemudian Cina, Korea, Philipina, India, Arab dan Turki. Orang Bugis bersama-sama orang Banjar pada permulaan 1729 (Eisen Berger, 1750) di bawah Pimpinan Poenna Dekke mengembangkan pertanian budi daya, penangkapan hasil laut.

Pemanfaatan hasil hutan untuk kemakmuran rakyat Tanah Bumbu. Baru pada periode kepemimpinan *La Paliweng* menjadi raja di pagatan dengan gelar *Arang Lapaliweng Abdul Rahim*. Tanah Bumbu dapat disatukan sebagai suatu kesatuan wilayah di bawah satu pimpinan. Raja ini berputera *La Makkarrao Ambo Matturu Abdul Karim*. Begitu banyak raja-raja yang pernah memerintah di Tanah Bumbu sesudah Abdul Karim, antara lain: *Abdoel Djabar Andi Debong*, kemudian *I Raru Daeng Mangkaoe*, *Andi Sallo Abdoel Rachim* sampai terakhir *Andi Acong*, kemudian kawasan Tanah Bumbu menjadi suatu kewedanan Tanah Bumbu Selatan, sebagai bahagian Kabupaten Kotabaru. Masyarakat Tanah Bumbu sejak dulu sampai zaman perjuangan melawan penjajahan hingga sekarang merasa satu nasib, ini masih terpatери kuat. Berawal dari suatu cita-cita untuk mewujudkan suatu Kabupaten bagi kawasan yang kaya sumber daya alam, seluas 5.066,96 Km² yang meliputi 119 buah desa dan satu kelurahan. Terletak antara 115015' - 116004' bujur Timur dan 2052' - 3047' lintang Selatan (Bakosurtanal, 2003). Perjuangan untuk membentuk daerah Tanah Bumbu menjadi suatu kabupaten sendiri dimulai sejak tahun 1958 yang dimotori oleh para tokoh masyarakat Pagatan. Dengan kehadiran UU No.22 tahun 1999 Tanah Bumbu dalam Angka 2013 membawa angin segar terhadap cita-cita masyarakat Tanah Bumbu untuk mewujudkan wilayah Tanah Bumbu menjadi satu kabupaten tersendiri terlepas dari Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Kotabaru. Sehingga perjuangan untuk membentuk daerah Tanah Bumbu menjadi suatu kabupaten sendiri tersebut dilanjutkan oleh para tokoh-tokoh dari Kusan Hilir, Kusan Hulu, Satui, Sungai Loban dan Batulicin serta masyarakat asal Tanah Bumbu yang berada di luar

TENTANG PENULIS

M. Uhaib As'ad, lahir di Pulau Masalembu Sumenep pada tanggal 06 Maret 1960, merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara dari ayahanda H.Muhammad As'ad (almarhum dan ibunda Hj Sitti Hawariah (almarhumah). Menikah dengan Hj. Siti,Mutmainah, S.Ag., S.Sos, M.A, memiliki 3 orang anak.

Pendidikan yang dilalui Maderasah Ibtidaiyah, lulus tahun 1974 SMP lulus tahun 1977 dan SMA lulus tahun 1980. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah tahun 1988. Tahun 1998 mendapatkan *Magister of Sciences* (M.Si) pada Program Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Administrasi, Minat Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012.

Pengalaman kerja sebagai dosen dimulai pada tahun 1998 diangkat menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, selanjutnya menjadi Pembantu Dekan III pada tahun 2009-2011, juga mengajar pada program ekstensi Fisip Unv Islam Kalimantan Banjarmasin.

Buku ini menunjukkan bahwa melalui Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara, permasalahan pengelolaannya dipandang dari perspektif yang luas yaitu bagaimanakah Jaringan Bisnis dalam Politik Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai efektif. *Pertama* Politik dalam kebijakan pertambangan diharapkan secara transparan, melibatkan aktor dan *stakeholders*, ternyata belum efektif, masih melibatkan aktor negara dan pengusaha; *Kedua* aktor dan jaringan bisnis dalam politik kebijakan pertambangan batubara, ternyata keterlibatan pengusaha tambang dimanfaatkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai bandar politik (*political broker*) atau penyuplai dana (*supporting financial*) yang merupakan strategi dalam membangun jaringan bisnis dan politik, *Ketiga*, regulasi pengelolaan kebijakan pertambangan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, ternyata lebih berimplikasi negatif dan memarginalisasi masyarakat lokal. *Keempat*, model *ideal good coal mining practices* dalam kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan sebuah model dalam melibatkan semua aktor dan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan baik dalam perumusan kebijakan maupun pengelolaan terkait pertambangan batubara.

Tentang kesimpulan penelitian Politik kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan telah menjadikan isu kebijakan dan instrumen pesekongkolan untuk membangun patronase bisnis (ekonomi) dan kekuasaan politik, dan oleh karena itu saran dan rekomendasi penelitian ini adalah Untuk mengatasi *bad coal mining practice* atau carut-marutnya sistem politik kebijakan pertambangan batubara. pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu membuat kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan warga, dan pengelolaan pertambangan perlu melibatkan *stakeholders* agar dapat melahirkan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi warga lokal.



M. Uhaib As'ad, lahir di Pulau Masalembu Sumenep pada tanggal 06 Maret 1960, merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara dari ayahanda H. Muhammad As'ad (almarhum dan ibunda Hj Siti Hawariah (almarhumah). Menikah dengan Hj. Siti, Mutmainah, S.Ag., S.Sos, M.A, memiliki 3 orang anak. Pendidikan yang dilalui Maderasah Ibtidaiyah, lulus tahun 1974 SMP lulus tahun 1977 dan SMA lulus tahun 1980. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah tahun 1988. Tahun 1998 mendapatkan *Magister of Sciences* (M.Si) pada Program Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2015 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi, Minat Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman kerja sebagai dosen dimulai pada tahun 1998 diangkat menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, selanjutnya menjadi Pembantu Dekan III pada tahun 2009-2011, juga mengajar pada program ekstensi Fisp Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin.